Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rafidah Ilhami Hartoto

No. Mahasiswa : 14312552

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Rafidah Ilhami Hartoto

No. Mahasiswa : 14312552

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 2018

Penulis,



(Rafidah Ilhami Hartoto)

ii

Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Rafidah Ilhami Hartoto

No. Mahasiswa : 14312552

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 - September - 2018

Dosen Pembimbing,

(Umi Sulistiyanti, S.E.,Ak., M.Acc.)

iii

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, CORPORATE GOVERNANCE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING DI BEI TAHUN 2015-2017)

Disusun Oleh : **RAFIDAH ILHAMI HARTOTO**

Nomor Mahasiswa : **14312552**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 16 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc. .....

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)" ini dapat selesai dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat dilewati diimbangi dengan usaha dan dukungan, bimbingan, semangat, motivasi serta arahan dari dosen pembimbing, keluarga, serta teman-teman hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Tak lupa pulapenulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang amat mendalam kepada:

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang mengasihi dan menyayangi hamba-Nya. Terimakasih atas segala kenikmatan dan keberkahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dalam menjalani segala aktivitas dalam menuntut ilmu bisa berjalan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, terimakasih atas syafaatnya yang diberikan kepada penulis serta sikap dan sifat yang menjadi panutan bagi penulis agar lebih baik kedepannya.

3. Teruntuk Orang tua, Bapak dan Ibu terimakasih telah menjadi sosok panutan yang membimbing anak-anaknya sukses hingga saat ini dan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan. Terimakasih untuk sabar yang selalu diberikan kepada kami yang tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan kami akan kebaikan. Hanya doa yang dapat diberikan dari seorang anak untuk kedua orang tua agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
4. Bu Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Terimakasih atas saran dan ilmu yang diberikan, semoga jasa-jasa yang telah ibu berikan akan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang diberika. Serta, semoga ibu beserta keluarga diberi kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
6. Bapak Jaka Sriyana Dr., SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, SE., M.Si,Ak, CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi.
8. Saudara kandung penulis, terimakasih atas segala ilmu dan nasihat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesikan skripsi dengan baik.
9. Widya Kusuma Wardani dan Nisa Ulfa Dhila selaku sahabat penulis terimakasih atas waktu nya untuk mendengar segala keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi dan terimakasih atas nasihat yang diberikan kepada

penulis sehingga penulis tidak menjadi malas dalam menyelesaikan skripsi. *Keep in touch*ya!.

10. Yafi, Iqbal, Kuni dan Rendy selaku sahabat penulis terimakasih atas dukungan dan nasihatnya kepada penulis sehingga penulis menjadi terpacu untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman OCB M yang selalu mengirimkan doa dan dukungannya, *see u soon!*

Akhirnya kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 September 2018

(Rafidah Ilhami hartoto)

MOTTO

“Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6

“**Allah menyanyangi orang-orang yang bersabar dan melindunginya”**

“*wallahu maassobirin.”*

"*Dan Allah bersama orang orang yang sabar*." (QS Al-Anfal [8]: 66)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini ku persembahkan untuk :

Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Bapak dan Ibu beserta seluruh Keluarga besar

Sahabat dan Teman Seperjuangan

Daftar Isi

Halaman Judul i

Halaman Bebas Plagiarisme ..... ii.

Halaman Pengesahan ..... iii.

KATA PENGANTAR iv

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xiii

Daftar Gambar xiv

Daftar Lampiran xv

ABSTRAK xvi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 13

1.3 Tujuan Penelitian 14

1.4 Manfaat Penelitian 14

1.5 Sistematika Penulisan 15

BAB II 17

KAJIAN PUSTAKA 17

2.1 Teori Agensi 17

2.2 *Tax Avoidance* 18

2.3 Financial Distress 19
2.4 Corporate Governance 20
2.5 Kepemilikan Manajerial 22
2.6 Ukuran Dewan Direksi 22
2.7 Dewan Komisaris Independen 23
2.8 Komite Audit 23
2.9 Kepemilikan Institusional 24
2.10 Konservatisme Akuntansi 24
2.11 Penelitian Terdahulu 24
2.12 Pengembangan Hipotesis 30
2.12.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance* 30
2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* 31
2.12.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance* 32
2.12.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* 33
2.12.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* 34
2.12.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* 35
2.12.7 Pengaruh Konservatisme Terhadap *Tax Avoidance* 36
2.13 Kerangka Pemikiran 38
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
3.1 Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian . 39
3.2 Teknik Pengambilan Sampel 39

3.3 Teknik Pengumpulan Data 40
3.4 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 40
3.4.1 Tax Avoidance 40
3.4.2 *Financial Distress* 41
3.4.3 Kepemilikan Manajerial 42
3.4.4 Ukuran Dewan Direksi 42
3.4.5 Ukuran Dewan Komisaris 43
3.4.6 Komite Audit 43
3.4.7 Kepemilikan Institusional 44
3.4.8 Konservatisme Akuntansi 44
3.5 Teknik Analisis Data 45
3.5.1 Statistik Deskriptif 45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 45
3.6 Pengujian Hipotesis 47
3.6.1 Analisis Regresi Berganda 47
3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 48
3.6.3 Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*) 48
3.6.4 Uji Hipotesis (Uji T) 49
BAB IV 50
HASIL DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Hasil Pengumpulan Data 50
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 51
4.3 Uji Asumsi Klasik 53
4.3.1 Uji Normalitas 53

4.3.2 Uji Multikolinieritas 54
4.3.3 Uji Autokorelasi 55
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 56
4.4 Analisis Regresi Berganda 57
4.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) 59
4.4.2 Uji Regresi Simultan (F) 62
4.4.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2) 62
4.5 Pembahasan 62
4.5.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance* 62
4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* 63
4.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance* 64
4.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* 65
4.5.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* 66
4.5.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* 67
4.5.7 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* 68
BAB V 69
KESIMPULAN DAN SARAN 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Keterbatasan Masalah 69
5.3 Saran 70
5.4 Implikasi Penelitian 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 78

Daftar Tabel

1.1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2017 1

2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 25

4.1. Kriteria Sampel pada Penelitian 47

4.2. Descriptive Statistics 48

4.3. Hasil Uji Multiolinearitas 51

4.4. Hasil Uji Autokorelasi 52

4.5. Hasil Uji Linear Berganda 55

Daftar Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran…….35

4.1. Grafik Normal P-Plot 50

4.2. Uji Heterokedastisitas 55

Daftar Lampiran

Lampiran1 : Daftar Sampel Perusahaan 71
Lampiran 2 : Data ETR 72
Lampiran 3 : Data *Financial Distress* 73
Lampiran 4 : Data Kepemilikan Manajemen 74
Lampiran5 : Data Ukuran Dewan Direksi 75
Lampiran 6 : Data Dewan Komisaris Independen 76
Lampiran 7 : Data Komite Audit 77
Lampiran 8 : Data Kepemilikan Institusional 78
Lampiran9 : Data Konservatisme Akuntansi 79
Lampiran 10 : Hasil Data SPSS 80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *financial distress, corporate governance* dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance.* Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 43 perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 32 atau 96 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data dengan menggunakan analisis Regresi Linier. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: *Financial Distress,* kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi, *Tax Avoidance.*

ABSTRACT

This research aims to empirically examines the influences of financial distress, corporate governance and accounting conservatism on Tax Avoidance. The research's population of this study are Banking Companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2015-2017, which is 43 companies. This research samples were to 32 companies or 96 observation data selected by purposive sampling method. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) and it was analyzed by multiple regression. The results of the research shows that Financial Distress has a negative influence on Tax Avoidance. While managerial ownership, independent board of directors, audit committee and accounting conservatism positively affect Tax Avoidance and the size of the board of directors and institutional ownership does not affect Tax Avoidance.

Keywords: Financial Distress, managerial ownership, board size, independent board of directors, audit committee, institutional ownership, accounting conservatism, Tax Avoidance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib baik perorangan maupun perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan negara (Santoso, 2014). Pajak yang disetorkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perorangan maupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada perusahaan.

Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan atas pajak selama tiga tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2015-2017

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	**2015**	**%**	**2016**	**%**	**2017**	**%**
Penerimaan Pajak	1.496.047,33	85,40%	1.596.946,60	85,90%	1.732.952,00	86,94%
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	14,59%	261.976,30	14,09%	260.242,10	13,05%
Total	1.751.675,81	100%	1.858.922,90	100%	1.993.194,10	100%

Sumber : www.bps.go.id

Pendapatan penerimaan atas pajak setiap tahun mengalami peningkatan, maka bagi pemerintah sudah seharusnya menggerakan kegiatan patuh pajak agar kesejahteraan dan pembangunan masyarakat segera terealisasi.

Freise (dalam Lanis R. a., 2013) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Maka dari itu, penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat diperlukan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan keperluan negara. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, dibalik sangat diperlukannya pajak untuk keperluan negara sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya menolak untuk membayar pajak secara berkala. Hal itu dikarenakan perbedaan kepentingan antara masyarakat denga pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa pajak yang dibayarkan tidak dipergunakan dengan baik.

Selain masyarakat, sebagian perusahaan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan hanya menjadi pengurang pendapatan perusahaan. (Lanis R. a., 2013) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Karena pajak merupakan pengurang laba bersih perusahaan, manajer mengambil tindakan untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan melakukan *Tax Avoidance* (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan stategi perpajakan yang dianggap relevan. Menurut Gusti Ayu, et al, (2014) *Tax Avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang ditunjukan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan

kelemahan - kelemahan (*loophole*) ketentuan – ketentuan perpajakan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, *Tax Avoidance* dilakukan karena dianggap sebagai beban dalam pengurangan pendapatan lembaga atau perusahaan. Ernest (2013) mendefinisikan *Tax Avoidance* berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, *Tax Avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Zain, 2005:49). Menurut Sartika, (2015) Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance (Tax Avoidance).*

Peristiwa mengenai *Tax Avoidance* di Indonesia, yakni pernah dilakukan oleh PT. BCA. Direktur PT.BCA, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pajak oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), pasalnya direktur PT.BCA diduga menyalahgunakan wewenang saat menjadi Direktur Jendral Pajak pada 2001 – 2006. Direktur PT.BCA tersebut menerima permohonan keberatan pajak atas BCA sehingga bank tersebut tidak membayar pajak yang sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian pada negara. Penggelapan tersebut dikarenakan

pemanfaatan celah hukum dengan cara menggunakan dana tersebut diluar dari kegiatan utama perusahaan, seperti menaikkan tunjangan dan gaji karyawan ataupun menyuap oknum pejabat. (www.kompasiana.com) dari hal tersebut dapat dilihat bahwa, pengaruh *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan ekonomi perusahaan serta dalam penyusunan laporan keuangan. Pasalnya, PT.BCA dikenal sebagai perusahaan yang sangat maju, dan bukan termasuk dari perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan yang *Financial Distress* (kesulitan keuangan).

Financial Distress (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress condition)* atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Haryetti, 2010). Menurut Yunus (2003) industri perbankan Indonesia menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal maka dapat dipastikan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian. Bila sistem

perbankan dalam kondisi yang tidak baik, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik. Sedangkan kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Perwira, 2009 dalam Endri, 2008).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2004) mendefinisikan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah dimerger. Bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akan lebih tertekan jika sudah mengarah ke arah kebangkrutan karena adanya biaya-biaya tambahan. Dalam upaya menekan biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, para regulator dan para manajer perusahaan berupaya bertindak cepat mencegah kebangkrutan atau menurunkan biaya kegagalan tersebut, yaitu dengan mengembangkan metode CAMEL Rating System. Dilansir dari www.researchgate.net menyatakan bahwa *CAMELS model as a tool is very effective, efficient and accurate to be used as a performance evaluate in banking industries and to anticipate the future and relative risk. CAMELS ratios are calculated in order to focus on financial performance. The CAMELS stands for Capital adequacy, Asset quality, Management, Earning and Liquidity and Sensitivity. In this study some important ratios are chosen and calculated to evaluate bank's performance. Data which is used in this study is gathered from annual financial reports of an Iranian bank. Then data is compared with other*

bank's ratios and reports. Certainly, the trends of calculations and relevant figures show important points for managers and also, CAMELS rating can be an efficient tool to manage and control and decide in management accounting view. Maksudnya adalah, *CAMELS* Rating System dianggap sebagai alat yang efektif dan efisien untuk digunakan sebagai evaluasi perbankan, *CAMELS* digunakan untuk mengantisipasi resiko masa depan. Rasio yang diukur berfokus pada kinerja keuangan, berberapa rasio dipilih dan dihitung untuk mengevaluasi kinerja bank. Penilaian menggunakan *CAMELS* ini dapat dijadikan alat untuk mengelola dan mengendalikan serta memutuskan hal mendeteksi kemungkinan kondisi perusahaan dalam padangan dari akuntansi manajemen. Dengan terdeteksinya lebih awal kondisi perusahaan, sangat memungkinkan bagi perusahaan, investor dan para kreditur (lembaga keuangan) serta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah agar krisis keuangan segera tertangani.

Menurut Edwards *et al* (2012), ada beberapa implikasi untuk kebijakan pajak perusahaan ketika mengalami *financial distress*. Contoh, meningkatnya biaya modal, menurunnya sumber keuangan eksternal yang dihadapi perusahaan yang mengalami financial distress, dan lebih umumnya, keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko dengan praktik *Tax Avoidance* (Lanis R. G., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rani Alifianti, (2017) menyatakan bahwa lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya pendapatan menghasilkan aliran yang jelas. sehingga, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *financial distress* dan *Tax Avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Amrie

Firmansyah, (2017) menyatakan bahwa *Financial distress* (kesulitan keuangan) yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *tax aggressiveness* (tingkat agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini bisa saja disebabkan karena cara untuk mendapatkan keuntungan dan kas ketika terjadi kesulitan keuangan bukanlah dengan menggelapkan atau menghindari pajak. Cara ini dianggap terlampau berisiko dibandingkan cara-cara lain. Cara lain yang dimaksud misalnya melakukan efisiensi melalui pemecatan pegawai, pengoptimalan mesin, gedung, dan sebagainya.

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, yang terpenting dari keseluruhannya ialah tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang baik dan dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan tujuan perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang buruk pada perusahaan akan berdampak pada kinerja perusahaan secara berkelanjutan, menuntun kondisi keuangan perusahaan menjadi memburuk dan mengalami *financial distress* (Radifan, 2015) . *Corporate Governance* terdiri atas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017). Semakin besar kepemilikan saham perusahaan atas manajer, semakin kecil pula perbedaan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan karena manajer juga akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil (Demsey *and* Laber, 1993) dalam

Nuraeni (2010). Kepemilikan manajerial sendiri dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownership*).

Pada penelitiannya T.Pohan (2009), membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Avoidance*, di mana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Batara, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *Tax Avoidance* untuk dilakukan.

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Wahidawati (2001). Jika dikaitkan dengan *Tax Avoidance* maka kepemilikan institusional yang tinggipada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Febri,dkk (2013) dihasilkan kepemilikan institusional

mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu, et al (2014), Ni Nyoman dan I Ketut (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*. Pada dasarnya, jika pengawasan akan manajemen tinggi, maka untuk terjadinya *Tax Avoidance* akan semakin kecil.

Selanjutnya, yakni Ukuran Dewan Direksi. Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002) . Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* perusahaan dan membuktikan dalam penelitiannya semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Dewan Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi, (Halim,2012). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga managemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, di samping undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian yang dilakukan oleh (Batara, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Deddy, et al (2016), menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI*)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selanjutnya yakni, Komite Audit. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang – kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang (Deddy, et al, 2016). Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Sarra, 2017) Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, et al (2016) menunjukkan bahwa, Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarra (2017) menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian

sebelumnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015) menunjukkan bahwa jumlah komite tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Konservatisme Akuntansi menurut FASB *Stament of Concept* No.2 merupakan reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberi informasi terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan. Faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah reaksi *Prudence.*

Prudence dianggap sebagai pembatasan prinsip konservatisme akuntansi pada batasan yang wajar (Wang, 2009 dalam Ardina 2012). *Prudence* lebih berfokus pada kehati-hatian dalam melakukan penilaian pada keadaan yang tidak pasti pada suatu perusahaan, sehingga penilaian perusahaan terhadap aset, utang dan lainnya memang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa rekayasa. Akuntansi konservatisme memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan juga lebih rendah. Perusahaan akan cenderung berusaha menurunkan nilai kini pajak penghasilananya untuk menaikan nilai perusahaaan (Watts, 2003 dalam Susi, 2010).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Sundari (2017) menyatakan bahwa Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukan bahwa semakin konservatif suatu laporan

keuangan, maka tindakan *Tax Avoidance* akan semakin kecil dikarenakan akan semakin besar pula pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Batara (2015) menyatakan bahwa Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin sempit.

Beberapa peneliti seperti Timothy (2010), Bala Krishnan dkk (2011), serta Lanis dan Richardson (2012) menggunakan *ETR* untuk mengukur *tax avoidance*. Menurut Hanlon dan Heinztman (2010) pendekatan *ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. ETR perusahaan sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dan kelompok kepentinfan sebagai alat untuk membuat kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan karena mereka memberikan ringkasan statistik yang mudah atas efek kumulatif dari pemberian berbagai insentif pajak dan perubahan tingkat pajak penghasilan badan (Gupta dan Newberry, (1997) dalam Annisa, 2013). Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai *ETR* yang lebih rendah. Dalam penelitian, proksi pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan ETR.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017)**.** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rani Alifianti (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya tambahan variabel baru yaitu kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi. Selain itu objek yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan perbankan yang listing di BEI sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerialberpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
7. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
4. Pengaruh dewan komisarisindependen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaanperbankan.
5. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
6. Pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
7. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaanperbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis pengaruh Pengaruh *Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017) yaitu:

1. Bagi Pemerintah Direktorat Jendral Pajak, dapat menambah informasi dan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak wajib badan pada perusahaan sektor perbankanan.

2. Bagi Perusahaan, penilitan ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakn perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu *Tax Avoidance*.
3. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya dalam *financial distress*, *corporate governance* dan konservatisme akuntansi dengan baik sehingga dapat mengurangi praktik *Tax Avoidance* di perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, skripsi ditulis dan disajikan kedalam lima bab. Yang mana tiap-tiap babnya akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab I ini, menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang didapat dari literaturliteratur serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Praktik *Tax Avoidance* seringkali dikaitkan dengan kesulitan keuangan dan bagaimana sistem *corporate governance* yang dijalankan di perusahaan itu sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976), Teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai kontral kerja sama (*nexus ofcontract*) di mana satu atau lebih *principal* (pemimpin) menggunakan orang lain (agen) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal* yang dimaksud adalah mereka yang memegang saham baik pemilik maupun investor. Sedangkan yang dimaksud agen adalah mereka yang ditunjuk dan dipercaya oleh *principal* sebagai manajer untuk melaksanakan tugas yang diemban sehingga dapat tercapai tujuan dan sasarannya.

Hendriksen dan Breda (1992) dalam Kurniasih dan Maria (2013) menyatakan teori agensi adalah hubungan kontrak antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). *Agent* melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal,prinsipal mempuny ai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agent berupa kompensasi bonus. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, (2012) dalam Darmadi, 2013.) Namun, ketika perusahaan mengalami *financial distress* manajer akan berupaya

semaksimal mungkin agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Yang salah satu caranya adalah dengan melakukan praktik *Tax Avoidance* (*Tax Avoidance).*

2.2 *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan startegi perpajakan yang dianggap relevan. Ernest R. Mortenson (2013) mendefinisikan *Tax Avoidance* berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum yang dianggap mampu membuat keberhasilan pelaksanaan *Tax Avoidance*. Karena, *Tax Avoidance* dianggap sebagai beban pengurangan laba perusahaan, sehingga peusahaan merasa terbebani dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak.

Dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *tax avoidance*, apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang disetting sedemikian rupa sesuai *tax planning* yang dilakukan, yang terklasifikasi disebut *Tax Avoidance* dan *tax evasion* untuk yang tidak terklasifikasi agar dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) (frank *et al,*. 2009). Jika dilihat dari lingkung perundang-undangan, *Tax Avoidance* adalah suatu tindakan yang masih dalam aturan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion)* tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab, penggelapan pajak dianggap ilegal dalam pelaksanannya. Karena, penggelapan pajak seperti hal-nya

meloloskan diri dari pembayaran pajak. Akan tetapi, kedua kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.

Menurut Hanlon dan Heinztman (2010) pendekatan *ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Effective tax rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Ardansyah, 2014). *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3 Financial Distress

Financial Distress (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan yang disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress condition)* atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Haryetti, 2010). Dalam pembahasan sebelumnya, perusahaan yang terlibat dalam *financial distress* lebih disebabkan karena sudah terikatnya kontrak dengan pihak esternal. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan apa saja demi keberlangsungan perusahaan dan mengesampingkan mengenai reputasi negatif yang akan diperoleh perusahaan.

Perusahaan seharusnya bisa menakar bagaimana kondisi perusahaan kedepannya, tanpa harus terlibat dalam kondisi *financial distress* yang secara tidak langsung akan merugikan perusahaan dalam jangka waktu singkat.

2.4 Corporate Governance

Dalam pelaksanaan kinerja perusahaan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola (*corporate governance)* adalah suatu mekanisme yang diterapkan guna utuk menegakan prinsip keadilan dan pengawasan antara instansi perusahaan. Harapannya, dengan adanya tata kelola organisasi mampu menciptakan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Terdapat 5 prinsip dalam *corporate governance* yakni keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparacy)*

   Perusahaan harus memiliki sifat keterbukaan guna menyediakan informasi yang relevan dan dengan cara yang mudah untuk di akses. Sehingga, mudah dipahami oleh para stakeholder untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Di samping itu, perusahaan yang

terbuka akan memudahkan dewan para pemegang saham untuk mengarahkan kebijakan guna untuk pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability)*

Akuntabilitas yang dimaksud adalah kejelasan akan fungsi dan struktur di dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan *stakeholder*. Jika prinsip itu dijalankan, maka akan jelas hak dan kewajiban antara pemegang saham dan instansi perusahaan.

3. Tanggung Jawab (*responsibility)*

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting karena perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, tanggung jawab merpakan konsekuensi dari berlakunya pertauran yang berlaku di perusahaan.

4. Kemandirian

Perusahaan harus mengelola perusahaan tanpa memihak kepada siapapun, sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi.

5. Kewajaran

Harus adanya keadilan dalam pemenuhan hak antara pemegang saham baik yang sebagian ataupun keseluruhan. Dalam kata lain, adanya perlakuan yang sama dalam pemegang saham. Dan tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lain.

2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajerial memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena sebenarnya jika manajer menjalankan tugasnya guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maka tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam penentuan arah dan pengambilan keputusan. Terutama dalam melaksanakan *Tax Avoidance,* sebab dengan dilaksanakannya *Tax Avoidance* kemungkinan untuk mendapatkan reputasi negatif akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manejemn, akan dapat membaut pihak manjemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresfi dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016).

2.6 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan *corporate governance*, bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance.* Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat

kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

2.7 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah mereka yang berasal dari luar perusahaan. Tugas utama dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan, selain itu komisaris independen berperan sebagai penengah atau penghubung antara pemegang saham dengan agen untuk mengurangi konflik antara keduanya. Dewan komisaris memiliki peranan sebagai pemberi arah dan petunjuk untuk mengelola dan merumuskan strategi perusahaan. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen diharapkan akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik *Tax Avoidance* (Puspita and Harto, 2014).

2.8 Komite Audit

Komite audit merupakan bagian terpenting dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu dan krusial dalam pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkankualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikanperlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014). Tugas dari komite audit adalah pemeriksaan sekaligus pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan termasuk pada proses penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya komite audit dapat

meminimalisir tingkat kecurangan dalam tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan.

2.9 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan institusional dapat diartikan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain di luar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Wahidawati (2001). Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi 3 yaitu kepemilikan perorangan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang didalanya termasuk eksekutif perusahaan (Pohan et al, 2009). Jika dikaitkan dengan *Tax Avoidance* maka kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi.

2.10 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah sikap atau reaksi kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga tidak keliru dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Sikap kehati-hatian tersebut akan berdampak pada pemberian informasi atas laporan keuangan untuk lebih transparan serta tidak menyesatkan. Selain itu, konservatisme akuntansi berdampak pula pada penerbitan laporan keuangan agar tidak keliru, karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk maa yang akan datang.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diringkas dan ditampilkan pada table berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	(Rani Alfianti, 2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.*Financial Distress* 2.kepemilikan manajerial 3.ukuran dewan direksi 4.ukuran dewan komisaris 5.komite audit	1. *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance.* 2. Ukuran Dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance.* 3. komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance* 4. kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance* 5. komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance.*
2	Putri dan Adnan (2017)	Dependen:*Tax Avoidance* Independen : 1.*Financial Distress* 2.Karakteristik Perusahaan 3.Kompensasi Eksekutif	1. *Financial distress* berpengaruh terhadap *taxAvoidance* 2. karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* 3. kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3	(I Gede Hendy, et al, 2014)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1. *Corporate Governance* 2. *Leverage* 3. *Return On Assets* 4. Ukuran Perusahaan	1. *Corporate governance* berpengaruh pada *Tax Avoidance*. 2. *Leverage* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

			3. ROA berpengaruh pada *Tax Avoidance*. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh pada *Tax Avoidance*.
4	Afri Astrian, Dwi Fitri, Ethika (2014)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Kepemilikan Institusional 2.Dewan Komisaris 3.Komite Audit 4.Konservatisme Akuntansi	1. *Corporate governance* berpengaruh pada *Tax Avoidance*. 2. tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dewan komisaris independen terhadap variabel *Tax Avoidance*. 3. terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komite audit terhadap variabel *Tax Avoidance*. 4. tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel konservatisme akuntansi terhadap variabel *Tax Avoidance.*
5	(Novi Sundari, 2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen: 1. Konservatisme Akuntansi 2. Intensitas Aset Tetap 3. Kompensasi Rugi Fiskal 4. Kepemilikan Manajerial 5. Kualitas Audit	1. Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 3. Kompensasi rugi fiskal tidak memberikan dampak bagi perusahaan terkait *tax avidance* 4. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 5. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

6	(Batara, 2015)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1. Konservatisme Akuntansi 2. Kepemilikan Manajerial 3. Ukuran Dewan Komisaris	1. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. 2. Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. 3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
7	(Sarra, 2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Konservatisme Akuntansi 2.Komite Audit 3.Dewan Komisaris Independen	1. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 3. Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 4. konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
8	(Deddy, et al, 2016)	Dependen:*Tax Avoidance* Independen : 1. Komite Audit 2. Komisaris Institusional 3. Dewan Komisaris 4.Ukuran Perusahaan (SIZE) 5. Leverage 6. Profitabilitas	1. Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR)* 2.Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR).* 3.Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI*)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR).*

			4.Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR).* 5. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR).* 6. Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR).*
9	Hidayana (2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Kompensasi Eksekutif 2.Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit 3.Komisaris Independen	1. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* 2. Latar belakang keahlian keuangan dan akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* 3.Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
10	Noriska Sitty, Dudi Pratomo, Siska Priyandi (2017)	Dependen: *Tax Avoidance* Independen : 1.Kepemilikan Manajerial 2.Komisaris Independen 3.Komite Audit	1. kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*. 2. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. 3. Komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*.
11	Fenny Winata (2014)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Kepemilikan Institusional	1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 2. Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance.*

		2.Dewan Komisaris Independen 3.Kualitas Audit 4.Komite Audit	3.Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance.* 4. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance.*
12	Putu Rista, IGK Agung (2016)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Komite Audit 2.Komisaris Independen 3.Kepemilikan Institusional 4.Ukuran Perusahaan	1. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 2.Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*
13	Arry Eksandy (2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1.Komisaris Independen 2.Komite Audit 3.Kualitas Audit	1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaranpajak (*Tax Avoidance*). 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*(*Tax Avoidance*). 3. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (*Tax Avoidance*).
14	Putri Amelia, Adnan (2017)	Dependen : *Tax Avoidance* Independen : 1. *Financial Distress* 2. Karakteristik Eksekutif 3. Kompensasi Eksekutif	1.*Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* 2. Variabel karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* 3. Variabel kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.12 Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu penyebab terjadinya kondisi kesulitan keuangan adalah keburukan pengelolaan bisnis *(mismanagement)* perusahaan tersebut. Perusahaan yang terlibat dalam *financial distress* akan berupaya sekuat tenaga, bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Selain itu, perusahaan akan berupaya bagaimana agar perusahaan tetap terlihat baik walaupun perusahaan terlibat dalam *financial distress.* Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Frank *et al.*, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis, Richardson dan Taylor (2015) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, perusahaan yang mengalami *financial distress* menunjukkan peningkatan pada biaya modal, *rating* kredit yang melemah, dan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih untuk makin melakukan *Tax Avoidance*. Semakin besar keterlibatan perusahaan dalam *financial distress,* maka semakin besar pula perusahaan tersebut akan melakukan *Tax Avoidance.* ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance,* dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki

hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H1 : *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, pihak manajemen akan membuat manajer menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent.*

Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut dapat membuat manajer termotivasi untuk menigkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta meningkatkan pengawasan akan jalannya kegiatan ekonomi diperusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Batara dan Maria (2015) menunjukkan bahwa kepemlikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* Jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Jika presnentase kepemilikan atas saham diperusahaan semakin besar, maka

keterlibatan perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance* akan semakin kecil. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance,* dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.12.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan *corporate governance,* bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance.* Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan *corportae governance* yang baik. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *Tax Avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi maka kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil, karena dewan direksi mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak

manajemen sebagai pengelola perusahaan, dan biasanya manajemen akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi sebuah kecurangan baik itu demi kepentingan perusahaan ataupun semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi seperti motivasi atas bonus dan *reward* yang diperoleh dari hasil kinerja yang dianggap baik. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance,* dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Maka dari itu, semakin besar porsi dewan direksi dalam perusahaan, maka akan semakin kecil perusahaan terlibat dalam *Tax Avoidance.*

H3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

2.12.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Perbedaan dewan komisaris adalah dewan komisaris berasal dari kalangan luar perusahaan yang tidak memiliki afiliasi secara langsung dengan perusahaan. Dewan komisaris diharapkan dapat berperan secara efektif untuk bisa menemukan secara dini mengenai adanya kecurangan atas kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga managemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan

dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik *Tax Avoidance* (Puspita dan Harto 2014). ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance,* dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Batara dan Maria (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.12.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Tingkat transaparansi yang baik juga berdampak minat investor untuk menanamkan modal atau saham di dalam perusahaan (Winata 2014). Komite audit berfungsi sebagai memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Dalam teori agensi menjelaskan *agency problem* tentu diakibatkan adanya asimetri informasi. Agar prinsip tersebut dapat terpenuhi maka komite audit harus

bekerja secara optimal. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dengan demikian, adanya komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap tindakan pengukuran atau pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajamen, termasuk dalam tindakan manajemen pajak (Annisa, 2012). Dalam pengawasannya, semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan akan pembuatan laporan keuangan perusahaan akan semakin besar dan kegiatan perusahaan terhadap *Tax Avoidance* semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rista dan IGK Agung (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

H5 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.12.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan institusional dapat diartikan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Wahidawati (2001). Di dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajamen, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi

terhadap perilaku manajemen di dalam sebuah perusahaan. Sehingga, dihrapkan dengan pengawasan yang tinggi mampu menghindari dari praktik penghidaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suardana (2014) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tehadap *Tax Avoidance*. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Sama seperti hal-nya kepemilikan manajerial, semakin besar kepemilikan saham akan institusional maka akan semakin kecil perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*.

H6 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.12.7 Pengaruh Konservatisme Terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme Akuntansi, menurut FASB *Statment of Concept* No.2 adalah reaksi hati hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Konservatisme akuntansi memiliki manfaat atau peranan di dalam teori keagenan yang paling efisien yang bisa membatasi konflik keagenan. Di dalam aktivitasnya seringkali perilaku *agent* meningkatkan kesejahteraanya sendiri. Sehingga, konservatisme akuntansi dapat mencegah asimetri informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik manipulasi laporan keuangan. Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen

manajemen untuk memberi informasi terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Semakin diterapkannya konservatisme akuntansi dalam perusahaan, maka sikap kehati-hatian akan pembuatan laporan keuangan juga akan semakin besar, dan kegiatan *Tax Avoidance* akan semakin kecil untuk dilakukan. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

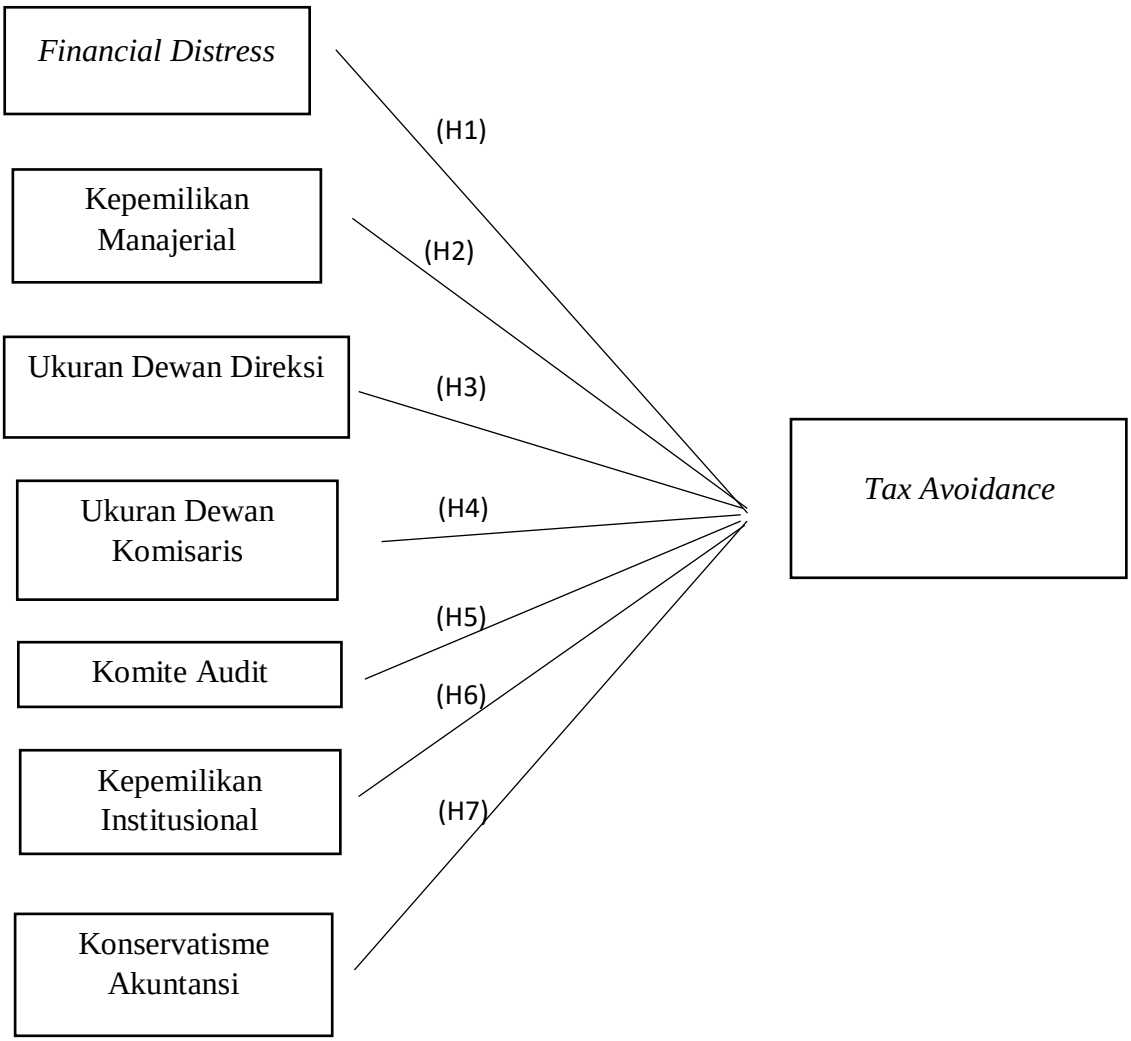
Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sarra et al. 2014) menyebutkanadanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance.*

H7 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yng telah dibuat, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu dengan berlandaskan filsafat positivisme, dan penelitian merupakan instrument yang digunakan untuk pengumpulan datanya, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk menguji sampel atau responden dari hipotesis yang sudah di tetapkan pada langkah sebelumnya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 - 2017

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive samplingyang ditentukan untuk menentukan sampel dijelaskan antara lain:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2017
2. Perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian selama 2015-2017, dikarenakan kerugian akan mengakibatkan ETR menjadi negatif
3. Perusahaan memiliki data-data yang diperlukan untuk penelitian.
4. Perusahaan perbankan yang menggunakan satuan mata uang Rupiah selama 2015 – 2017

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa Laporan keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tahunan perusahaan yang diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia *(www.idx.co.id)*, karena dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yaitu daftar Perusahaan perbankan selama periode 2015-2017 dari *website* IDX, kemudian penelitimengumpulkan data yang dibutuhkan dan mengolah data yang dibutuhkan.

3.4 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang diteliti menggunakan indicator-indikator pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012:64). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (y).

Variable-variabel yang termasuk kedalam variable independen merupakan variable yang mempengaruhi atau bisa jadi penyebab adanya perubahan atau timbulnya variable dependen (terikat). Yang termasuk kedalam variabel independen dalam penelitian ini yaitu*Financial Distress, Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi.

3.4.1 Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan startegi perpajakan yang dianggap relevan. *Tax Avoidance* dilakukan karena menganggap bahwa pajak

merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan banyak cara, salah satunya dengan menggunakan rumus *ETR.* Menurut Hanlon dan Heinztman (2010) pendekatan *ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vivi (2016), pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 *Financial Distress*

Financial Distress (kesulitan keuangan) merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, pengukuran *financial distress* menggunakan rumus Altman *Z-Score* sebagai berikut:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3D + 0.6D + 1E$$

Dimana:

A = Aset lancar-utang lancar / Total aset
B = Laba ditahan / Total aset
C = Laba sebelum pajak / Total aset
D = Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham / Total utang
E = Penjualan / Total aset

Dalam Altman *Z-Score,* potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Jika nilai $Z \geq 2{,}99$, maka perusahaan tersebut berada di zona aman, di mana bebas dari distress. Bila nilai $1{,}81 \leq Z < 2{,}99$, artinya perusahaan

masuk ke dalam zona abu-abu, Dan yang terakhir, jika nilai Z < 1,81 , maka perusahaan berada di dalam zona distress.

3.4.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan Christiawan dan Tarigan (2017). Dengan kata lain, manajer akan semakin aktif dalam meningkatkan nilai dan citra perusahaan. Dalam penlitian ini, kepemilikan manajerial diukut berdasarkan penelitian Sabli dan Noor (2013) dengan rumus :

$$KM = \frac{\text{Total Saham Manajer}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

3.4.4 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002) . Komposisi dari dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta independen. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Masing-masing kedudukan anggota direksi termasuk direktur utama adalah sama. Dalam penelitian ini, perhitungan yang dipakai untuk menghitung ukuran dewan direksi diambil berdasar penelitian dari Subramanyam *et al,* (2009) :

UDD = Total anggota dewan direksi

3.4.5 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi Halim (2012). Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Dalam penelitian ini, untuk mengukur dewan komisaris diambil berdasar pada penelitian Siallagan & Machfoedz (2006) :

$$\text{UDK} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Seluruh Dewan Komisaris}}$$

3.4.6 Komite Audit

Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangai agresifitas perilaku *Tax Avoidance* perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik komite audit yang berbeda. Penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

KA = Jumlah anggota komite audit

3.4.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan institusional dapat diartikan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Wahidawati (2001). Dilihat dari tingkat kepemilikannya, semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar akan pengawasan terhadap pihak manajemen. Dalam penelitian ini, kepemilikan intitusional diukur dengan indikator berikut (Khurana dan Moser, 2009):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total kepemelikan saham oleh pihak institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.4.8 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah sikap tau reaksi kehati-hatian dalam menghadapi hal ketidak pastian. Reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberi informasi terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Prudence dianggap sebagai pembatasan prinsip konservatisme akuntansi pada batasan yang wajar Wang (2009) dalam Ardina (2012). Penerapan konservatisme akuntansi dapat diketahui melalui pengukuran dengan cara mengurangi laba bersih dengan arus kas operasi Belkaoui (2006) dalam Setiawan (2013).

$$KA = \frac{(\text{Laba Bersih+Depresiasi}) - \text{arus kas (-1)}}{\text{Total Aset}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitngan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Ghozali, 2006). Yang termasuk ke dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel pengganggu atau variabel residual. Uji normalitas ini merupakan tahap pengujian yang harus dilakukan karena ketika asumsi klasik dihilangkan, uji statistik menjadi tidak valid. Penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Dikatakan model regresi mematuhi asumsi normalitas apabila nilai *Asymp. Sig* lebih dari 0.05. Jika nilai *Asymp. Sig* lebih dari 0.05 maka data tersebut terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut penelitian oleh Ghozali (2006), untuk melihat atau mendeteksi adanya multikolinearitas dalam suatu regresi dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) nya, menggunakan dasar seperti berikut ini : (1) apabila nilai *tolerance*< 0.1 dan nilai VIF > 10, maka akan terjadi masalah multikolinearitas yang berarti model regresi tersebut tidak baik.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk menguji dan mengetahui adanya korelasi pada varians error antar period eke periode dari berbagai penelitian. Dalam uji ini, menggunakan Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dari pengujian yang telah dilakukan. Kriterianya adalah apabila angka DW > +2 berarti ada autokorelasi positif, lalu angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, serta apabila angka DW dibawah -2 berarti autokorelasinya negatif.

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan utuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Dengan tidak adanya heteroskedastisitas di suatu mmodel regresi, atau biasa disebut dengan homoskedastisitas yang diuji

menggunakan *scatterplot*. Menurut Ghozali (2006) yang biasa dugunakan sebagai dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergabung, melebar, kemudian menyempit), maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh *financial distress,* kepemilikan manajerial, kepemilikan institusionl, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance* a = Harga konstanta (harga Y bila X=0) b1,2,3,4,5,6,7 = Harga koefisien regresi

X1 = Variabel *financial distress*

X2 = Variabel Kepemilikan Manajerial

X3 = Variabel Ukuran Dewan Direksi

X4 = Variabel Dewan Komisaris Independen

X5 = Variabel Komite Audit

X6 = Variabel Kepemilikan Institusional

X7 = Variabel Konservatisme Akuntansi e = *standard error*

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2006) menyampaikan bahwa yang digunakan untuk pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen adalah koefisien determinasi (R2). Penilaian koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Kelemahan yang mendasar pada koefisien determinasi yaitu terjadinya bias pada jumlah variable independen, maka penelitian inimenggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *Adjusted* R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Apabila dalam uji empiris terdapat *Adjusted* R2 bernilai negatif, maka nilai *Adjusted*R2 dianggap bernilai nol.

3.6.3 Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Digunakan untuk malakukan uji H0 dimana data empiris sesuai dengan model regresinya, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara data dengan model sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut cocok atau fit. Pengambilan keputusan uji kelayakan model adalah: (a) Jika nilai goodness of fit statistic > 0,05 maka H0 diterima yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi belum layak digunakan. (b) Jika nilai goodness of fit statistic < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti model mampu

memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi layak digunakan

3.6.4 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat dilakukan uji t apabila nilai signifikasi t pada masing-masing variable yang ada pada output hasil regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat significances level 0.05 (α= 5%). Dputuskan bahwa H0 ditolak apabila signifikan t $\geq$ 0.05, sedangkan ditingkat signifikan itu juga Ha diterima yang berarti secara individual variable independen tidak berpengaruh signifikan pada variable independen. Diputuskan H0 diterima apabila signifikan t $\leq$ 0.05, sedangkan Ha ditolak yang berarti secara individual vaariabel independen berpengaruh signifikan pada vaariabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, dimana metode ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan pada Perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Pengambilan sampel ini dilkukan dengan cara *purposive sampling* yang artinya diambl dengan kriteria tertentu. Sampel penelitian yang termasuk dalam kriteria yang yakni sebanyak 32 perusahaan. Distribusi sampel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.1 Kriteria Sampel pada Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 - 2017	**43**
2	Perusahaan perbankan yang mengalami kerugian selama 2015-2017	**(6)**
3	Perusahaan tidak memiliki data-data yang diperlukan untuk penelitian.	**(5)**
4	Perusahaan perbankan yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah selama 2015 – 2017	**(0)**
5	Jumlah Sampel Perusahaan	**32**
	Jumlah Pengamatan (Jumlah sampel x 3 tahun penelitian)	**96**

Sumber data Sekunder yang sudah diolah 2018

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.2 Tabel Statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial_Distress	96	-10.47	6.63	3.3928	2.95609
Kepemilikan_Manajerial	96	.000000	1.408300	.02645104	.150500378
Ukuran_Dewan_Direksi	96	3.00	12.00	6.7708	2.48989
Dewan_Komisaris_Independen	96	.000000	.800000	.53615104	.132655359
Komite_Audit	96	2.00	7.00	3.9167	1.16679
Kepemilikan_Institusional	96	.01	1.10	.3325	.29607
Konservatisme_Akuntansi	96	-.12	1.21	.0196	.12651
ETR	96	.000000	4.961500	.28847604	.500308819
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 24 (2018)

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Financial Distress (X1) memiliki nilai minimum sebesar -10.47 dan nilai maksimumnya sebesar 6.63. Nilai rata-rata financial distress adalah sebesar 3.3928. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.95609 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel financial distress, adalah sebesar 2.95609 dari 96 sampel yang digunakan.
2. Kepemilikan Manajerial (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 dan nilai maksimumnya sebesar 1.408300. Nilai rata-rata kepemilikan manajerail adalah sebesar 0.0264510. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.150500378 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 0.150500378 dari 96 sampel yang digunakan.

3. Ukuran Dewan Direksi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 3.00 dan nilai maksimumnya sebesar 12.00. Nilai rata-rata ukuran dewan direksi adalah sebesar 6.7708. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.48989 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel ukuran dewan direksi adalah sebesar 2.48989 dari 96 sampel yang digunakan.
4. Dewan Komisaris Independen (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0.000 dan nilai maksimumnya sebesar 0.8000. Nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah sebesar 0.53615. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.132655 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel dewan komisaris independen adalah sebesar 0.132655 dari 96 sampel yang digunakan.
5. Komite Audit (X5) memiliki nilai minimum sebesar 2.00 dan nilai maksimumnya sebesar 7.00 Nilai rata-rata komite audit adalah sebesar 3.9167. Sedangkan standar deviasi sebesar 1.1667 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel komite audit adalah sebesar 1.1667 dari 96 sampel yang digunakan.
6. Kepemilikan Institusional (X6) memiliki nilai minimum sebesar .01 dan nilai maksimumnya sebesar 1.10. Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 0.3325. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.29607 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0.29607 dari 96 sampel yang digunakan.
7. Konservatisme akuntansi (X7) memiliki nilai minimum sebesar -0.12 dan nilai maksimumnya sebesar 1.21. Nilai rata-rata konservatisme akuntansi

adalah sebesar -0.196. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.12651 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel konservatisme akuntansi adalah sebesar 0.12651 dari 96 sampel yang digunakan.

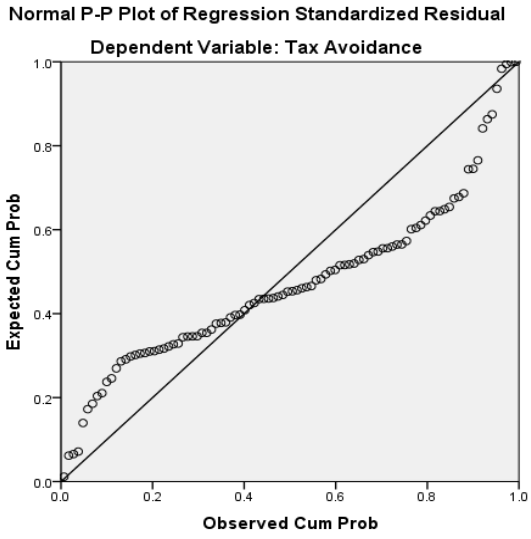
8. *ETR* (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0.000 dan nilai maksimumnya sebesar 4.9615. Nilai rata-rata *ETR* adalah sebesar 0.2884. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.50030 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel *ETR* adalah sebesar 0.50030 dari 96 sampel yang digunakan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat kenormalan distribusi dalam model regresi pada variabel pengganggu atau variabel residual. Uji normalitas penting untuk dilakukan karena jika asumsi klasik dihilangkan, maka uji statistik menjadi tidak valid. Dalam penelitian ini Uji normalitas dapat dilihat melalui penyebaran data yang ada pada sumbu diagonal dari grafik.

Gambar 2.1 Grafik Normal P-Plot



Berdasarkan grafik diatas, menunjukan bahwa grafik plot berada disekitar garis dan tidak menjauhi dari garis diagonal. Dengan demikian kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan tetdistribusi normal dan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas hanya dapat dilakukan jika variabel yang digunakan dalam model regresi lebih dari satu. Cara umum yang digunakan oleh peneliti untuk uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor).* Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Nilai yang dijadikan acuan untuk menunjukkan tidak adanya masalah multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* > 0.10 atau nilai *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Financial Distress	.751	1.331
Kepemilikan Manajerial	.985	1.015
Ukuran Dewan Direksi	.670	1.493
Dewan Komisaris Independen	.909	1.100
Komite Audit	.825	1.213
Kepemilikan Institusional	.951	1.052
Konservatisme Akuntansi	.966	1.035

(Sumber: data Sekunder yang Diolah, 2018)

Nilai *VIF* yang dihasilkan dalam table menunjukan bahwa variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Nilai *tolerance* yang diperoleh untuk tiap-tiap variabel bebas diatas 0.10 dan nilai *VIF*nya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara sesama variabel bebas yang terdapat didalam model regresi dan tidak terdapat multikolinearitas diantara sesame variabel bebas didalam model regresinya.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Uji ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2005). Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541[a]	.292	.236	.14045	1.972

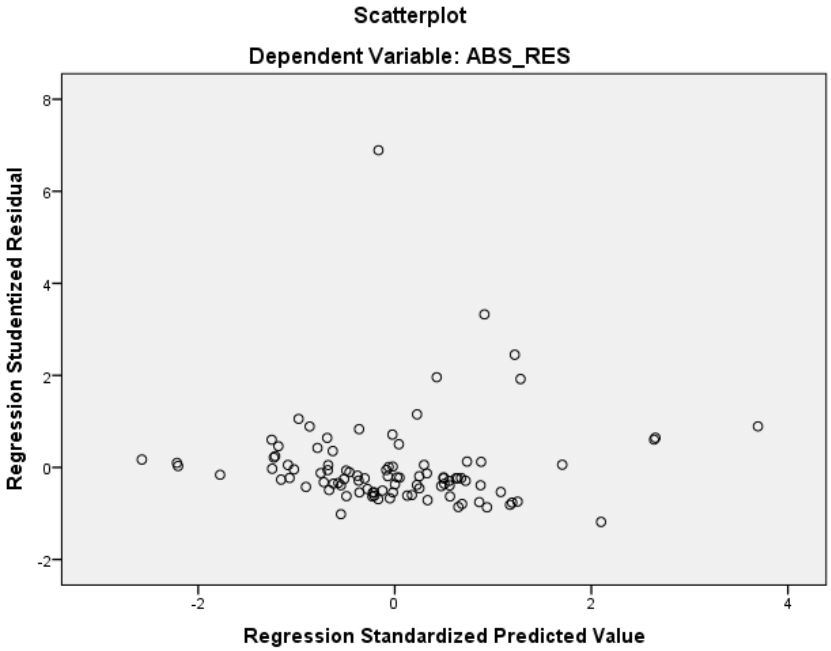
(Sumber: data Sekunder yang Diolah, 2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1,972. Nilai DU pada tabel Durbin Watson di dapat 1,8265. Nilai 4 – Du = 2,1735. Sehingga terjadi kategori DU < DW < (4-Du) atau 1,8265 < 1,972 < 2,1735. Dengan demikian demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi Autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastistas). Jika varians dari pengamatan residual satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas



Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa gambar plot tersebar tidak membentuk pola yang teratur, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi peningkatan ETR, berdasarkan masukan variabel independen *Financial Distress,* kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh *Financial Distress,* kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi terhadap ETR digunakan analisis regresi linear berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Ho: Jika probabilitas (p) ≥ 0,05 artinya *Financial Distress,* kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi secara simultan maupun parsial tidak memiliki pengaruh terhadap ETR

Ha: Jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya *Financial Distress,* kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh terhadap ETR.

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t
(Constant)	0.566		
Financial Distress	0.068	2.762	0.007
Kepemilikan Manajerial	-0.298	-2.178	0.032
Ukuran Dewan Direksi	-0.051	-1.121	0.266
Ukuran Dewan Komisaris	-0.327	-2.417	0.018
Komite Audit	-0.118	-2.133	0.036
Kepemilikan Institusional	-0.014	-1.236	0.220
Konservatisme Akuntansi	-0.337	-2.153	0.034
F hitung	5.195		
Sig F	0.000		
Adjusted R Square	0.236		

(Sumber : Data Sekunder 2018)

Berdasarkan tabel diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 *for windows* didapat hasil sebagai berikut

$Y = 0.566 + 0.068\ X_1 - 0.298\ X_2 - 0.051\ X_3 - 0.327\ X_4 - 0.118\ X_5 - 0.014\ X_6 - 0.337\ X_7 + e$

Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0.566, menunjukkan jika variabel independen dianggap tidak ada maka akan terjadi peningkatan ETR sebesar 0.566. Koefisien regresi untuk variabel *financial distress* sebesar 0.068 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat *financial distress* maka dapat menaikan variabel ETR sebesar 0.068. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.298 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat

kepemilikan manajerial maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.0298. Koefisien regresi untuk variabel ukuran dewan direksi sebesar 0.051 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat ukuran dewan direksi maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.051. . Koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris independen sebesar 0.327 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat dewan komisaris independen maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.327. Koefisien regresi untuk variabel komite audit sebesar 0.118 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat komite audit maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.118. Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0.014 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat kepemilikan institusional maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.014. Koefisien regresi untuk variabel ukuran konservatisme akuntansi sebesar 0.337 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat konservatisme akuntansi maka dapat menurunkan variabel ETR sebesar 0.337.

4.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Konservatisme Akuntansi dengan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

4.4.1.1 Hipotesis 1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0.007 (0,007≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_1 gagal diterima, yang berarti bahwa Financial Distress berpengaruh positif terhadap *ETR* atau berpengaruh negatif terhadap *TaxAvoidance*.

4.4.1.2 Hipotesis 2

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,032 (0,032≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_2 gagal diterima, yang berarti bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh berpengaruh negatif terhadap *ETR* atau berpengaruh positif terhadap *TaxAvoidance*.

4.4.1.3 Hipotesis 3

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,226 (0,226>0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_3 gagal diterima, yang berarti bahwa Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

4.4.1.4 Hipotesis 4

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,018 (0,018≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_4 gagal diterima, yang berarti bahwa

Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *ETR* atau berpengaruh positif terhadap *TaxAvoidance*.

4.4.1.5 Hipotesis 5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,036 (0,036≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_5 gagal diterima, yang berarti bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *ETR* atau berpengaruh positif terhadap *TaxAvoidance*.

4.4.1.6 Hipotesis 6

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,220 (0,220>0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_6 gagal diterima, yang berarti bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.4.1.7 Hipotesis 7

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,034 (0,034≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_7 gagal diterima, yang berarti bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap *ETR* atau berpengaruh positif terhadap *TaxAvoidance*.

4.4.2 Uji Regresi Simultan (F)

Dari hasil uji F pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 5.195 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig F_{hitung}<5% (0,000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Konservatisme Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.4.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) = 0,236, artinya variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 23,6% sisanya sebesar 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.762 dan nilai signifikan sebesar 0.007 (0,007≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_1 gagal diterima, yang berarti bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Dapat disimpulkan bawah hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima. Hal ini menunjukan bahwa, semakin besar keterlibatan perusahaan

dalam *Financial Distress* maka akan semakin kecil perusahaan tersebut untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Hal ini dikarenakan, jika perusahaan terlibat dalam *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *Tax Avoidance.* Sebab perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian Putri (2017) yang mneyatakan *financil distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Lanis, Richardson dan Taylor (2015) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -2.178 dan nilai probabilitas sebesar 0,032 (0,032≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_2 gagal diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Nilai *ETR* yang rendah menunjukkan semakin besar tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avidance* gagal diterima.

Hal ini dikarenakan, dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan, akan membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui penggunaan metode dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba menjadi lebih kecil. Hal ini menyebabkan tindakan *Tax Avoidance* dilakukan. Hasil penelitian ini didiukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeane (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Batara dan Maria (2015) menunjukkan bahwa kepemlikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

4.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -1.121 dan nilai probabilitas sebesar 0,226 (0,226>0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_3 gagal diterima, yang berarti bahwa Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap ETR atau tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima.

Hal ini disebabkan karena ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance,* hal ini disebabkan karena perusahaan atau dalam hal ini pihak dewan direksi lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan sanksi

administrasi ataupun yang lebih buruk untuk kemudian memutuskan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Selain itu, direksi biasanya cenderung mendukung segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam hal yang mampu menguntungkan perusahaan, termasuk dalam hal tindakan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nissa (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani dan Anis (2017) berpendapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance* perusahaan.

4.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan table di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t-hitung -2.417 dan nilai probabilitas sebesar 0,018 (0,018≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_4 gagal diterima, yang berarti bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap ETR atau berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima.

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jumlah komisaris independen maka semakin besar tanggung jawab untuk memenui kewajiban pajak, dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan perusahaan akan merasa tertekan atas tanggung jawabnya, maka kemungkinan untuk melakukan *Tax Avoidance* semakin

besar untuk dilakukan Hasil ini sejalan dengan penelitian Pohan (2008) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun sebaliknya, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Batara dan Maria (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t-hitung -2.133 dan nilai probabilitas sebesar 0,036 (0,036≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_5 gagal diterima, yang berarti bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap ETR atau berpengaruh positf terhadap *Tax Avoidance. ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima.

Dalam hal ini dikarenakan dalam pedoman GCG juga tertulis bahwa ketua komite audit adalah salah seorang dari dewan komisaris independen, dimungkinkan jika dewan komisaris independen menyalahgunakan kewenangannya, maka secara struktur komite audit tidak akan memberikan laporan yang sebenarnya kepada pihak pemilik, dalam hal ini dewan komisaris. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -1.236 dan nilai probabilitas sebesar 0,220 (0,220>0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_6 gagal diterima, yang berarti bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap ETR dan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi di luar perusahaan dan mereka telah memberikan keputusannya kepada dewan direksi, dimana dewan direksi juga memberikan keputusannya kepada keputusan manajemen. Dapat dikatakan bahwa, dengan ada atau tidaknya kepemilikan institusional kemungkinan dilakukannya *Tax Avoidance* akan tetap terjadi. Selain itu, karena pemilik institusional kurang pedulidengan citra perusahaan. Sehingga apapun keputusan manajemen asalkan hal itu bisamemaksimalkan kesejahteraan mereka maka akan didukung. Meskipun keputusan tersebut adalah melakukan *tax avoidance*. Hasil penilitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2014) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tehadap *Tax Avoidance.*

4.5.7 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -2.153 dan nilai probabilitas sebesar 0,034 (0,034≤0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha_7 gagal diterima, yang berarti bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *ETR* berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *ETR* Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* gagal diterima.

Hal ini disebabkan karena penerapan konservatisme dalam pengakuan penundaan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya atau kerugian, dimana hal tersebut akan berdampak pada penurunan laba yang dijadikan sebagai perhitungan atas kewajiban pajak perusahaan. Maka dari itu kegiatan *Tax Avoidance* akan semakin besar untuk dilakukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi (2017) menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positifterhadap *Tax* Avoidance. Namun sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarra et al, (2014) menyebutkanadanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

5.2 Keterbatasan Masalah

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat memperngaruhi hasil penelitian yang ingin di capai antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian, sehingga tidak bisa membedakan spesifikasi jenis industri dimana secara struktur akuntansi antara industri yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga relative kecil karena keterbatasan periode pengamatan yang hanya 3 tahun pada setiap perusahaannya, yaitu 2015-2017.
2. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.236 yang berarti *Tax Avoidence* dipengaruhi oleh *Financial Distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan

institusional dan konservatisme akuntansi sebesar 23.6%, sisanya sebesar 76.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

5.3 Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut adalah saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel penelitian dengan jenis industri yang berbeda sehingga dapat membedakan variable yang telah dibahas di penelitian ini dari beberapa jenis industri atau jenis perusahaan yang berbeda. Dan juga diharapkan untuk penelitian yang mendatang agar menambah periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih bias dibandingkan dengan penelitian terdahulu.
2. Diharapkan untuk penelitian mendatang agar menambah variable independen lain seperti ukuran perusahaan, *leverage*, atau profitabilitas. Dan untuk pengukuran masing-masing variable bisa ditambah lagi, seperti koneksi politik, diversitas dewan direksi dan GCG menggunakan kepemilikan keluarga, rapat umum pemegang saham(RUPS).

5.4 Implikasi Penelitian

a. Pihak Perusahaan: Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan tidak hanya di perbankan namun juga perusahaan lain yang

terdaftar di BEI untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan *Tax Avoidance* agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

b. Pihak Investor: Bagi para investor yang memiliki relasi dengan suatu perusahaan, tentu harus lebih meningkatkan pengawasan kepada pihak manajemen, agar memperhatikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut sehingga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penyimpangan *Tax Avoidance* menjadi semakin kecil, sehingga investor pun akan merasa aman dan terhindar dari kasus-kasus yang tidak diinginkan.

c. Pihak Pemerintah: Bagi pihak pemerintah diharapkan agar lebih tegas dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan wajib pajak badan, agar peraturan yang telah diberlakukan tidak memiliki celah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan oleh pelaku pajak yang dalam kaitanya adalah *Tax Avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, W. Y. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009-2012)*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Ajeng Wijayanti, Et Al. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional Ienaco*.

Amrie Firmansyah, Y. F. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Acticity Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5*(3), 1601-1624.

Amrie, Et Al. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal Of Business Administration, 1*(2), 17-36.

Batara, M. M. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13*(3), 705-722.

Daniel, Et Al. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 3*(2), 191-205.

Deddy, Et Al. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting, 2*(2).

Fadhilah, R. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011).* Padang: Universitas Negeri Padang.

Farahmita. (2012). Insentif Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss19 (5thed).* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusti Ayu, Et Al. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *6*(5), 259-260.

I Gede Hendy, Et Al. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 143-161.

I Gede, Et Al. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9*(1), 143-161.

I Made, C. W. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 47-62.

Ida Ayu, E. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16*(1), 72-100.

Komang, Et Al. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepeilikan Keluarga Dan Coporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1*(2), 167-193.

Laksana, J. (2015). Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1*, 269-288.

Lanis, R. A. (2013). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness : A Test Of Legitimacy Theory. *26*(1), 75-100. Diambil Kembali Dari Https://Doi.Org/10.1108/09513571311285621

Lanis, R. G. (2017). Board Of Director Gender And Corporate Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis. *Journal Of Business Ethics, 144*(3). Diambil Kembali Dari Https://Doi.Org/10.1007/S10551-015-2815-X

Mariska, Et Al. (2013). Hubungan Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Konservatisme Akuntansi Di

Indutsri Perbankan Indonesia Periode 2009-2011. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2*(1).

Melia, P. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 84-92.

Nila Sari, N. K. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting Feb Ums*.

Novi Sundari, V. A. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *Jrak, 8*(1), 85-109.

Okta S, E. A. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Oktofian, M. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tac Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2009-2013).* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Prasetyo, E. A. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bei Tahun 2006-2008.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Radifan. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*, 1-71.

Rani Alfianti, A. C. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting, 6*(2), 1-11.

Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6*(3).

Santoso, T. B. (2014). *Pengaruh Corporaet Governance Terhadap Pengindaran Pajak Perusahaan.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive, 1*(1).

Sartika, M. (2015). Analisih Perbedaan Penghindaran Pajak (Tac Avoidance) Pada Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Final Dan Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final. *Jom Fekon, 2*(1), 1-15.

T.Pohan, H. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *4*(2).

Tandean, V. A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U)*.

Tommy, Et Al. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, 18*(1).

Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review, 4*(1).

Yogi, I. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Beban Iklan Pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17*(2), 1311-1341.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Daftar Sampel Perusahaan

NO	KODE	NAMA EMITEN
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.
2	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk
3	BABP	Bank MNC Internasional Tbk
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk
5	BBKP	Bank Bukopin Tbk
6	BBMD	Bank Mestika Darma Tbk
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
9	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
10	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
11	BCIC	Bank J Trust Inodnesia Tbk
12	BDI	Bank Danamon Indonesia Tbk
13	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
14	BJBR	Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
15	BJTM	Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk
16	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk
17	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
18	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
19	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
20	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
21	BNLI	Bank Permata Tbk
22	BSIM	Bank Sinarmas Tbk
23	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk
24	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
25	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
26	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
27	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
28	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
29	MEGA	Bank Mega Tbk
30	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
31	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
32	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Lampiran 2

Data *ETR 2015-2017*

No	Nama	2015	2016	2017
1	AGRO	0.2735	0.2709	0.2744
2	ARTO	4.9615	0.1365	0.2500
3	BABP	0.2690	0.2882	0.2438
4	BBCA	0.2040	0.2015	0.2002
5	BBKP	0.1819	0.1964	0.1156
6	BBMD	0.2533	0.7473	0.2527
7	BBNI	0.2028	0.2022	0.1978
8	BBNP	0.2596	0.3284	0.1370
9	BBRI	0.2180	0.2280	0.2155
10	BBTN	0.2718	0.2136	0.2160
11	BCIC	0.0372	0.0092	0.0265
12	BDI	0.2476	0.3643	0.2868
13	BEKS	0.1395	0.2065	0.2360
14	BJBR	0.2182	0.2122	0.2577
15	BJTM	0.2987	0.2919	0.0000
16	BKSW	0.2531	0.2490	0.0000
17	BMRI	0.1978	0.2112	0.2104
18	BNBA	0.2665	0.2604	0.2683
19	BNGA	0.2493	0.2698	0.2833
20	BNII	0.2028	0.2022	0.1978
21	BNLI	0.1582	0.2491	0.2131
22	BSIM	0.2251	0.2491	0.2173
23	BSWD	1.0616	0.1218	0.1400
24	BTPN	0.2795	0.2798	0.2658
25	BVIC	0.0010	0.0808	0.2274
26	INPC	0.1539	0.2119	0.2115
27	MAYA	0.2572	0.2456	0.2579
28	MCOR	0.3020	0.7208	0.3375
29	MEGA	0.1501	0.2507	0.2117
30	NISP	0.2501	0.2387	0.2439
31	PNBN	0.3621	0.2384	0.3223
32	SDRA	0.2675	0.2614	0.2633

Lampiran 3

Data *Financial Distress 2015-2017*

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	3.90	4.96	3.76
2	ARTO	2.34	0.15	1.15
3	BABP	4.11	3.91	2.77
4	BBCA	6.63	6.26	6.04
5	BBKP	3.19	2.94	2.44
6	BBMD	6.07	5.66	6.04
7	BBNI	4.72	4.47	4.44
8	BBNP	4.32	4.19	3.34
9	BBRI	5.68	6.04	5.77
10	BBTN	2.48	2.86	2.89
11	BCIC	-10.47	-9.27	-8.90
12	BDI	5.46	5.26	5.71
13	BEKS	-2.30	-3.52	-0.22
14	BJBR	2.87	3.58	3.78
15	BJTM	4.61	5.25	5.71
16	BKSW	2.69	1.45	1.30
17	BMRI	5.02	4.74	4.92
18	BNBA	4.65	4.62	5.23
19	BNGA	3.61	3.74	4.28
20	BNII	3.87	3.40	3.18
21	BNLI	2.61	0.56	2.38
22	BSIM	4.31	4.70	4.70
23	BSWD	2.88	-1.85	1.29
24	BTPN	6.38	6.26	6.03
25	BVIC	3.23	2.56	2.99
26	INPC	4.02	3.15	2.95
27	MAYA	4.49	3.72	3.55
28	MCOR	4.84	4.26	3.85
29	MEGA	4.77	4.95	4.86
30	NISP	4.38	3.39	3.69
31	PNBN	4.39	4.64	4.05
32	SDRA	5.25	4.49	5.22

Lampiran 4

Data Kepemilikan Manajerial

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	0,0048	0,0020	0.0006
2	ARTO	0,0000	0,0000	0,0000
3	BABP	0,4345	1,4083	0.0000
4	BBCA	0,0024	0,0020	0,0016
5	BBKP	0,0002	0,0002	0.0002
6	BBMD	0,0005	0,0002	0.0002
7	BBNI	0,0002	0,0000	0.0002
8	BBNP	0,0178	0,0177	0.0177
9	BBRI	0,0031	0,0018	0.0011
10	BBTN	0,0105	0,0062	0.0045
11	BCIC	0,0000	0,0000	0.0000
12	BDI	0,0017	0,0000	0.0000
13	BEKS	0,0020	0,0000	0.0000
14	BJBR	0,0021	0,0002	0.0002
15	BJTM	0,0000	0,0013	0.0000
16	BKSW	0,0000	0,0000	0.0000
17	BMRI	0,0000	0,0000	0.0000
18	BNBA	0,0000	0,0000	0.0000
19	BNGA	0,0000	0,0000	0.0000
20	BNII	0,0000	0,0000	0.0000
21	BNLI	0,0000	0,0000	0.0000
22	BSIM	0,0004	0,0003	0.0000
23	BSWD	0,0161	0,0161	0.0166
24	BTPN	0,0064	0,0065	0.0006
25	BVIC	0,1235	0,1448	0.0249
26	INPC	0,0344	0,0285	0.0255
27	MAYA	0,0067	0,0459	0.0466
28	MCOR	0,0079	0,0294	0.0068
29	MEGA	0,0000	0,0000	0.0000
30	NISP	0,0001	0,0001	0.0000
31	PNBN	0,0000	0,0000	0.0000
32	SDRA	0,0023	0,0018	0.0010

Lampiran 5

Data Ukuran Dewan Direksi

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	5	5	5
2	ARTO	3	3	3
3	BABP	5	5	4
4	BBCA	5	5	5
5	BBKP	7	7	7
6	BBMD	5	5	5
7	BBNI	10	10	11
8	BBNP	5	5	5
9	BBRI	10	11	11
10	BBTN	7	8	8
11	BCIC	3	4	4
12	BDI	6	9	9
13	BEKS	4	4	5
14	BJBR	7	7	7
15	BJTM	4	5	5
16	BKSW	5	5	5
17	BMRI	11	10	10
18	BNBA	3	3	3
19	BNGA	10	11	11
20	BNII	8	8	7
21	BNLI	8	9	9
22	BSIM	6	5	6
23	BSWD	3	4	4
24	BTPN	6	7	7
25	BVIC	6	5	5
26	INPC	7	6	7
27	MAYA	9	9	8
28	MCOR	5	6	6
29	MEGA	10	10	9
30	NISP	9	10	10
31	PNBN	12	12	11
32	SDRA	7	7	7

Lampiran 6

Data Dewan Komisaris Independen

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	0,5000	0,5000	0,5000
2	ARTO	0.6667	0.6667	0.6667
3	BABP	0.6667	0.6667	0.6667
4	BBCA	0.6000	0.6000	0.6000
5	BBKP	0.5000	0.5714	0.5714
6	BBMD	0.5000	0,5000	0.5000
7	BBNI	0,6250	0,6250	0.6364
8	BBNP	0,5000	0,5000	0.5000
9	BBRI	0,6250	0,5556	0.5556
10	BBTN	0,5714	0,5714	0.5000
11	BCIC	0,7500	0,5000	0.5000
12	BDI	0,5714	0.5714	0.2857
13	BEKS	0,5000	0,5000	0.5000
14	BJBR	0,7500	0,6000	0.8000
15	BJTM	0,4000	0,4000	0.4000
16	BKSW	0,5000	0,5000	0.5000
17	BMRI	0,5000	0,5000	0.5000
18	BNBA	0,0000	0,0000	0.0000
19	BNGA	0,5000	0,5000	0.5000
20	BNII	0,5000	0,5000	0.5000
21	BNLI	0,5000	0,5000	0.5000
22	BSIM	0,6667	0,6667	0.6667
23	BSWD	0,6000	0,6000	0.6000
24	BTPN	0,5000	0,6000	0.6000
25	BVIC	0,5000	0,5000	0.5000
26	INPC	0,5000	0,6000	0.6000
27	MAYA	0,4000	0,4000	0.4000
28	MCOR	0,6667	0,6667	0.6667
29	MEGA	0,5000	0,5000	0.5000
30	NISP	0,5000	0,5000	0.5000
31	PNBN	0,6667	0,5000	0.5000
32	SDRA	0,7500	0,7500	0.6667

Lampiran 7

Data Komite Audit

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	3	3	3
2	ARTO	3	3	3
3	BABP	4	4	4
4	BBCA	3	3	3
5	BBKP	5	5	5
6	BBMD	3	3	3
7	BBNI	4	3	2
8	BBNP	3	3	3
9	BBRI	4	6	6
10	BBTN	5	7	6
11	BCIC	4	7	6
12	BDI	5	6	6
13	BEKS	3	4	2
14	BJBR	5	5	5
15	BJTM	2	3	3
16	BKSW	3	3	3
17	BMRI	5	6	6
18	BNBA	3	3	4
19	BNGA	6	4	5
20	BNII	4	4	4
21	BNLI	3	4	4
22	BSIM	3	3	3
23	BSWD	3	3	3
24	BTPN	3	4	3
25	BVIC	5	5	5
26	INPC	6	4	4
27	MAYA	3	3	3
28	MCOR	3	3	3
29	MEGA	3	3	3
30	NISP	4	3	3
31	PNBN	4	4	4
32	SDRA	5	5	5

Lampiran 8

Data Kepemilikan Institusional

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	0.0910	0.0710	0.8360
2	ARTO	0.0566	0.0744	0.2000
3	BABP	0.1380	0.1280	0.1240
4	BBCA	0.4710	0.4710	0.5490
5	BBKP	0.1130	0.1130	0.1130
6	BBMD	0.1660	0.1050	0.1050
7	BBNI	0.5820	0.5820	0.0110
8	BBNP	0.0610	0.8100	0.0170
9	BBRI	0.4878	0.4997	0.5003
10	BBTN	0.0067	0.0098	0.1005
11	BCIC	0.1490	0.1490	0.3490
12	BDI	0.8290	0.1290	0.0290
13	BEKS	0.6780	0.5110	0.5110
14	BJBR	0.2360	0.2360	0.2360
15	BJTM	0.7980	0.1980	0.7980
16	BKSW	0.0920	0.0920	0.0810
17	BMRI	0.4345	0.4965	0.5120
18	BNBA	0.7668	0.7988	0.8010
19	BNGA	0.0270	0.0270	0.0820
20	BNII	0.6270	0.1270	0.6270
21	BNLI	0.4460	0.4460	0.4460
22	BSIM	0.0250	0.0250	0.0250
23	BSWD	0.1790	0.1790	0.2810
24	BTPN	0.6688	0.6998	0.7101
25	BVIC	0.1230	0.1310	0.1350
26	INPC	0.3440	0.3780	0.3780
27	MAYA	0.8370	0.8410	0.7990
28	MCOR	0.1680	0.0080	0.0080
29	MEGA	0.4210	0.4210	0.4190
30	NISP	0.0090	0.0410	0.0380
31	PNBN	1.0000	1.0040	1.1020
32	SDRA	0.0580	0.0580	0.0450

Lampiran 9

Data Konservatisme Akuntansi

NO	NAMA	2015	2016	2017
1	AGRO	0.0096	0.0091	0.0064
2	ARTO	-0.0004	-0.0430	0.0002
3	BABP	0.0007	0.0007	0.0640
4	BBCA	0.0303	1.2143	0.0311
5	BBKP	0.0102	0.0103	0.0013
6	BBMD	0.0169	0.0256	0.0224
7	BBNI	0.0180	0.0189	0.0194
8	BBNP	0.0078	0.0011	-0.0079
9	BBRI	0.0289	0.0261	0.0258
10	BBTN	0.0108	0.0122	0.0116
11	BCIC	-0.0513	-0.0447	0.0071
12	BDI	0.0131	0.0160	0.0215
13	BEKS	-0.0630	-0.0771	-0.0100
14	BJBR	0.0156	0.0113	0.0105
15	BJTM	0.0207	0.0239	0.0225
16	BKSW	0.0061	-0.0267	0.0000
17	BMRI	0.0232	0.0026	0.0143
18	BNBA	0.0087	0.0111	0.0128
19	BNGA	0.0018	0.0086	0.0112
20	BNII	0.0073	0.0118	0.0107
21	BNLI	0.0014	-0.0392	0.0050
22	BSIM	0.0067	0.0119	0.0105
23	BSWD	-0.0073	-0.1173	-0.0283
24	BTPN	0.0192	0.0205	0.0149
25	BVIC	0.0034	0.0039	0.0047
26	INPC	0.0028	0.0028	0.0025
27	MAYA	0.0078	0.0082	0.0090
28	MCOR	0.0067	0.0018	0.0032
29	MEGA	0.0154	0.0164	0.0158
30	NISP	0.0125	0.0130	0.0141
31	PNBN	0.1716	0.0126	0.0094
32	SDRA	0.0132	0.0137	0.0162

Lampiran 10

Hasil Data SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	96	-10.47	6.63	3.3928	2.95609
Kepemilikan Manajerial	96	.000000	1.408300	.02645104	.150500378
Kepemilikan Institusional	96	.01	1.10	.3325	.29607
Ukuran Dewan Direksi	96	3.00	12.00	6.7708	2.48989
Ukuran Dewan Komisaris	96	.000000	.800000	.53615104	.132655359
Komite Audit	96	2.00	7.00	3.9167	1.16679
Konservatisme Akuntansi	96	-.12	1.21	.0196	.12651
Tax Avoidance	96	.000000	4.961500	.28847604	.500308819
Valid N (listwise)	96				

Uji Asumsi Klasik

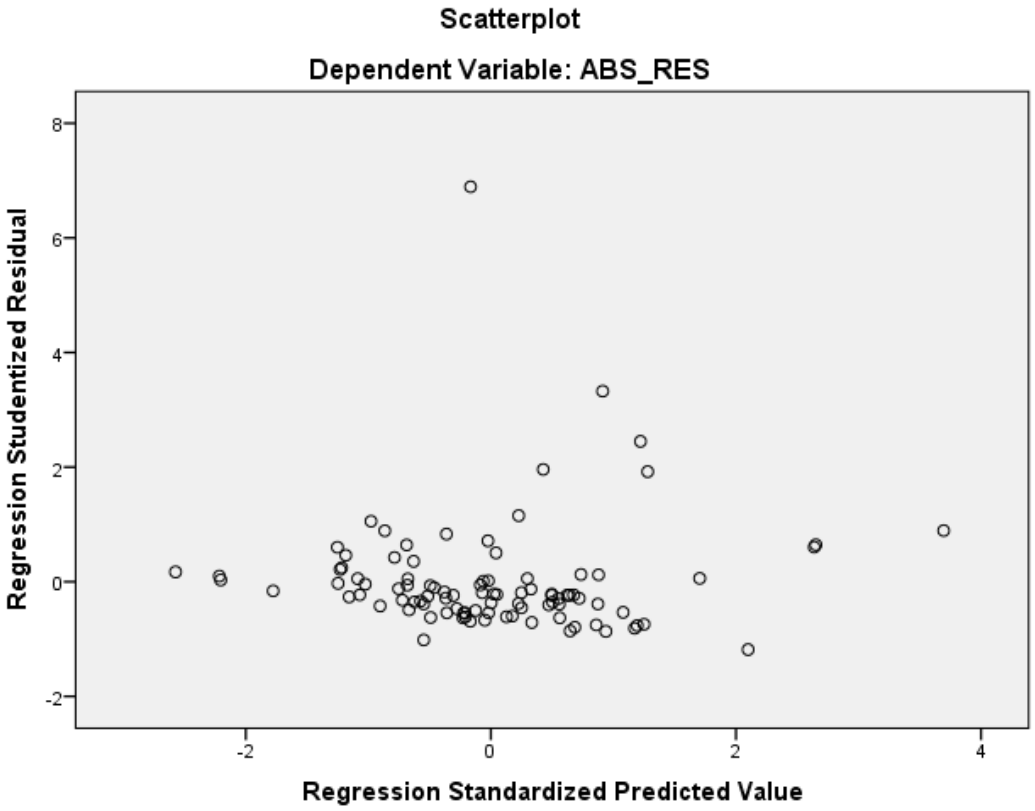
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0072917
	Std. Deviation	.10535282
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.137
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.200	.076		2.641	.010
	Financial Distress	.015	.019	.095	.801	.425
	Kepemilikan Manajerial	-.026	.105	-.026	-.247	.805
	Kepemilikan Institusional	.004	.009	.050	.479	.633
	Ukuran Dewan Direksi	.002	.035	.008	.065	.948
	Ukuran Dewan Komisaris	-.113	.104	-.117	-1.083	.282
	Komite Audit	-.062	.043	-.164	-1.455	.149
	Konservatisme Akuntansi	.106	.121	.091	.874	.385

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.566	.098		5.751	.000		
	Financial Distress	.068	.025	.286	2.762	.007	.751	1.331
	Kepemilikan Manajerial	-.298	.137	-.197	-2.178	.032	.985	1.015
	Kepemilikan Institusional	-.014	.011	-.114	-1.236	.220	.951	1.052
	Ukuran Dewan Direksi	-.051	.046	-.123	-1.121	.266	.670	1.493
	Ukuran Dewan Komisaris	-.327	.135	-.227	-2.417	.018	.909	1.100
	Komite Audit	-.118	.055	-.211	-2.133	.036	.825	1.213
	Konservatisme Akuntansi	-.337	.157	-.196	-2.153	.034	.966	1.035

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Uji Autokolerasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541[a]	.292	.236	.14045	1.972

a. Predictors: (Constant), Konservatisme Akuntansi, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Financial Distress

b. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541[a]	.292	.236	.14045

a. Predictors: (Constant), Konservatisme Akuntansi, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Financial Distress

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.717	7	.102	5.195	.000[b]
	Residual	1.736	88	.020		
	Total	2.453	95			

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

b. Predictors: (Constant), Konservatisme Akuntansi, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Financial Distress

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.566	.098		5.751	.000
	Financial Distress	.068	.025	.286	2.762	.007
	Kepemilikan Manajerial	-.298	.137	-.197	-2.178	.032
	Kepemilikan Institusional	-.014	.011	-.114	-1.236	.220
	Ukuran Dewan Direksi	-.051	.046	-.123	-1.121	.266
	Ukuran Dewan Komisaris	-.327	.135	-.227	-2.417	.018
	Komite Audit	-.118	.055	-.211	-2.133	.036
	Konservatisme Akuntansi	-.337	.157	-.196	-2.153	.034

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*